

Abstrak

Abdullah Akhyar Nasution. 2006. Perempuan Aceh Di Tengah Rekonstruksi Pascabencana: Kasus di Pusong –Kota Lhokseumawe, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini secara umum mengkaji tentang bagaimana perempuan Aceh memainkan peranannya di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran terkini dari dan keberadaan ide tentang kesetaraan gender pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta bagaimana kondisi dan peran perempuan dalam proses yang berlangsung.

Penelitian ini dilakukan di Pusong, sebuah daerah yang terkena hantaman tsunami. Secara administrasi Pusong masuk dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Penggalan data dilakukan selama lebih kurang 7 bulan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara mendalam dan Focuss Group Discussion (FGD). Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data dianalisa secara kualitatif dengan terlebih dahulu dibuat kategorisasi menurut kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan temuan dan analisa data, diperoleh kenyataan bahwa secara formal, ide kesetaraan gender telah dijadikan prinsip pokok oleh pemerintah dan LSM dalam memberikan layanan. Secara operasional, prinsip ini ternyata tidak bisa terimplementasi secara baik. Beberapa hal yang menghambat proses implementasinya adalah; (1) kesemrawutan pola koordinasi dan pembagian kewenangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pengawasan terhadap implementasi program agar menerapkan prinsip kesetaraan gender tidak terkontrol, (2) rendahnya kualitas sumberdaya perempuan sehingga tidak bisa secara maksimal untuk mengakses sumber-sumber informasi. Kualitas sumberdaya yang terbatas juga menyebabkan perempuan Pusong tidak bisa dengan baik merespon program yang ada, (3) Budaya patriarkat yang tersosialisasi di tengah masyarakat juga menyebabkan posisi tawar perempuan lemah. Dominasi laki-laki atas struktur dan pranata sosial yang ada menyebabkan perempuan tidak bisa berperan secara aktif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini amat kontradiktif dengan kenyataan bahwa perempuan secara ekonomis punya peran yang menentukan kelangsungan rumah tangga.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka ada beberapa hal yang bisa disarankan untuk dilakukan diantaranya bahwa pemerintah harus secepatnya harus mengeluarkan regulasi khusus menyangkut pola koordinasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi mulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan/pelaksanaan dan pengawasan. Bila sistem pengawasan berjalan dengan baik, maka perhatian terhadap ide perlunya pengarusutamaan perempuan akan lebih terjamin implementasinya. Pemerintah dan LSM harus didorong untuk melakukan program penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas perempuan Pusong melalui pendidikan formal dan non formal. Peningkatan kualitas ini secara langsung akan memberikan pengaruh pada kemampuan perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik termasuk duduk dalam struktur dan atau pranata sosial yang ada.